

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)**

Pada tanggal 18 Mei 2016 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadakan rapat, Merumuskan dan menyetujui pengungkapan "Rancangan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro", Usaha Kecil dan Menengah (ED SAK EMKM), dan pada tanggal 24 Oktober 2016, Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Kecil dan Menengah (SAK EMKM) disetujui oleh Komite Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) 1 Januari, 2018, Namun dianjurkan untuk melaksanakan pendidikan usia dini. Standar ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana daripada SAK ETAP, karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM, yaitu dengan dasar pengukuran menggunakan biaya historis, sehingga cukup mencatat asset dan liabilitas sebesar biaya perolehan (SAK EMKM, 2016 ).Di dalam SAK EMKM ini tidak dijelaskan terkait definisi dan kriteria kuantitatif EMKM. Maka digunakanlah *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008* tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk acuan dalam mendefinisikan. Penerbitan SAK EMKM digunakan sebagai pedoman bagi UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha dalam menyusun laporan keuangan. SAK EMKM juga memuat kesimpulan dasar (DK) dan contoh ilustrasi untuk memudahkan UMKM memahami standar akuntansi. Oleh karena itu, penerbitan SAK EMKM dapat membantu UMKM memperoleh dana dari lembaga keuangan.

#### **1. Akrua Basis**

Basis akrual (*accrual basis*) adalah teknik pencatatan yang mengakui terjadinya transaksi walaupun penerimaan kas dan pengeluaran kas belum terjadi atau kas baru diterima dan dikeluarkan di masa depan. Laporan keuangan dengan basis akrual mengakui adanya utang dan piutang. Dengan diakui pendapatan dan beban pada laporan keuangan dengan basis akrual sehingga informasi akan lebih relevan dengan setiap transaksi yang terjadi.

Berdasarkan SAK EMKM (2016) laporan keuangan EMKM disusun berdasarkan asumsi dasar akrual. DSAK IAI memutuskan untuk mempertahankan asumsi dasar akrual karena asumsi dasar tersebut konsisten dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, dan konsisten dengan asumsi dasar yang digunakan dalam SAK lainnya. Laporan keuangan yang disusun dengan dasar akrual akan menghasilkan informasi keuangan yang lebih merepresentasikan dengan tepat kondisi dan aktivitas bisnis entitas pada periode tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, tingkat kesiapan UMKM dalam implementasi SAK EMKM bisa dinilai dari sistem pencatatan keuangannya. Apabila UMKM dalam pencatatan keuangan berdasarkan akrual basis, maka UMKM dinilai siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Sehingga UMKM akan lebih mudah dalam menerapkan SAK EMKM. Namun apabila UMKM dalam pencatatan keuangan menggunakan kas basis, UMKM dinilai tidak siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Dikarenakan laporan keuangan yang berbasis kas harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu kas ke basis akrual.

## 2. Konsep Entitas Bisnis

Menurut Jusup (2011), konsep entitas bisnis adalah ketika entitas tersebut berdiri tersendiri sebagai suatu kesatuan yang terpisah. Konsep entitas bisnis ini adalah untuk mempermudah mengetahui apakah entitas mengalami perkembangan atau bahkan sebaliknya. SAK EMKM mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasar. Untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut. DSAK IAI menegaskan bahwa dalam hal entitas tidak memenuhi asumsi dasar konsep entitas bisnis maka entitas tersebut memiliki opsi untuk tidak menerapkan SAK EMKM (SAK EMKM, 2016). Berdasarkan pernyataan di atas, tingkat kesiapan UMKM dalam implementasi SAK EMKM akan dinilai dari konsep entitas bisnis. Jika UMKM belum memisahkan harta pribadi dengan usahanya, entitas tersebut tidak memenuhi konsep entitas bisnis. Sehingga entitas tersebut akan dinilai tidak siap dalam menerapkan SAK EMKM. UMKM yang sudah memisahkan harta pribadi dengan usaha berarti sudah memenuhi konsep entitas bisnis sehingga dinilai siap dalam menerapkan SAK EMKM.

## 3. Sumber Daya Manusia

Menurut Hariandja (2002) Sumber Daya Manusia

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan disamping faktor yang lain seperti modal. Oleh karena itu SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Sedangkan menurut Hasibuan (2003) Pengertian Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Sumber daya manusia dalam penelitian ini dimaksudkan adalah SDM yang memiliki pengetahuan tentang standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sehingga SDM yang dimaksud adalah yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sebagaimana dalam SAK EMKM bahwa penyusunan laporan keuangan minimal mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Maka penilaian dalam kesiapan UMKM dalam implementasi SAK EMKM bisa dilihat dari SDM yang memadai. Apabila UMKM mempunyai SDM yang memadai maka dinilai siap dalam implementasi SAK EMKM. Sebaliknya apabila UMKM tidak memiliki SDM yang memadai maka dinilai tidak siap dalam implementasi SAK EMKM.

### **2.1.2 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (SAK, 2017). Laporan posisi keuangan (*statement of financial position*) lazimnya dikenal sebagai neraca (*balance sheet*). Laporan keuangan merupakan suatu dasar informasi untuk menyusun dan mengevaluasi mengenai berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan pada periode yang telah lalu serta untuk menyusun perencanaan dan menentukan arah kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang. Kesatuan sistem informasi akuntansi yang melalui proses pengklasifikasian, pencatatan, pengikhtisaran akan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah disusun mencerminkan keadaan suatu perusahaan. Tujuan Laporan Keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi

penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. (IAI, 2016). Tujuan laporan keuangan secara umum menurut Irham (2012:24) :

- 1) Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.
- 2) Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pembuat keputusan bisnis dan ekonomis oleh investor yang ada dan yang profesional, kreditor, manajemen, pemerintah, dan pengguna lainnya.
- 3) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- 4) Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya.

#### **2.1.2.1 Komponen Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM**

Menurut SAK EMKM laporan keuangan yang wajib disusun oleh pelaku UMKM adalah sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode  
Laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada setiap akhir periode pelaporan. Pos-pos yang mencakup laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap akun-akun dalam penyajiannya. Meskipun demikian, penyajian pos-pos aset entitas dapat mengurutkan berdasarkan likuiditas dan pos-pos liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.
2. Laporan laba rugi selama periode  
Laporan laba rugi menyediakan informasi kinerja keuangan entitas yang terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporannya. Menurut SAK EMKM 2016 (5.1:11), laporan laba rugi merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Pos-pos yang mencakup laporan laba rugi entitas yaitu pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak.
3. Catatan atas laporan keuangan

Menurut SAK EMKM 2016 (6.1:13), catatan atas laporan keuangan memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

### **2.1.2.2 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan**

Menurut SAK EMKM 2016 (2.12:4), pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat pada aliran manfaat ekonomik masa depan dilakukan atas dasar bukti yang terkait dengan kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan saat penyusunan laporan keuangan. Penilaian itu dibuat secara individu untuk pos-pos yang tidak signifikan secara individual dan secara kelompok dari suatu populasi besar untuk pos-pos yang tidak signifikan secara individual.
2. Pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal dan dalam kasus lain biaya harus bisa diestimasi. Pengakuan-pengakuan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM sebagai berikut:

#### 1) Aset

Menurut SAK EMKM 2016 (2.22:6), aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonomiknya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonomiknya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran terjadi. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

#### 2) Liabilitas

Menurut SAK EMKM 2016 (2.23:6), liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang

mengandung manfaat ekonomik dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

3) Penghasilan

Menurut SAK EMKM 2016 (2.24:6), penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomik di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4) Beban

Menurut SAK EMKM 2016 (2.25:6), beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomik di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

### **2.1.2.3 Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan**

Menurut SAK EMKM (2016:5), pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

### **2.1.2.4 Penyajian Laporan Keuangan**

Menurut SAK EMKM (2016:7), penyajian wajar dari laporan keuangan sesuai dengan persyaratan SAK EMKM dan pengertian laporan keuangan yang lengkap untuk entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan penghasilan, dan beban. Pengungkapan diperlukan ketikakepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Relevan: informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
2. Representasi tepat: informasi dalam laporan keuangan

mempresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.

3. Keterbandingan: informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
4. Keterpahaman: informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

### **2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

#### **2.1.3.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat. UMKM mampu berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Hastuti, Puji, et al., 2020.) Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dalam Hastuti, Puji, et al (2020) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka pengertian UMKM dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan

oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Definisi UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam Aufar(2014:8) : Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Definisi UMKM menurut Bank Indonesia dalam Aufar (2014:9) : Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 200.000.000 per tahun, sedangkan usaha menengah, merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. 8 Rp. 500.000.000) dan non manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 600.000.000). Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa UMKM adalah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu.

Peran UMKM tidak dapat di ragukan lagi dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat tetapi pengertian dari UMKM tersebut masih beragam. Makna dari UMKM sendiri berbeda beda. Definisi yang berkaitan dengan UMKM antara lain menurut:

- a. Ketentuan undang undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan, dimana pengertian UMKM adalah sebagaimana di atur Undang-undang No. 20 tahun 2008



UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

b. Menurut badan Pusat Statistik tahun 2003 mendefinisikan UMKM menurut 2 kategori yaitu :

1) Menurut omset.

Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai aset tetap kurang dari Rp. 200.000.000 dan omset pertahun kurang Rp.1.000.000.000

2) Menurut jumlah tenaga kerja.

Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 5 sampai 9 orang tenaga kerja. Industri rumah tangga adalah industri yang memperkerjakan kurang dari 5 orang. UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah pekerjaannya sesuai definisi yang diberikan oleh pemerintah atau intitusi lain dengan tujuan tertentu (Sukirno, 2004: 365)

3) Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan industri kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesinmesin dan peralatan sebesar Rp.70.000.000,00 ke bawah dan usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia.

4) Menurut Suprpti (2005:48) UMKM adalah badan usaha baik perorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak Rp. 200.000.000,00 dan mempunyai hasil penjualan pertahun sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 dan berdiri sendiri.

### **2.1.3.2 Karakteristik UMKM**

Kriteria UMKM dalam Ketentuan UU. Republik Indonesia No.20 Tahun 2008:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

### **2.1.3.3 Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM). Beberapa kesimpulan, setidaknya hipotesis telah ditarik mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan UMKM ternyata tak bisa diabaikan (D.L. Birch, (1979) dalam (Tambunan & TH, 2002)).

Negara-negara berkembang yang mulai mengubah orientasinya ketika melihat pengalaman-pengalaman di negara-negara tentang peranan dan sumbangsih UMKM dalam pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) memainkan peran-peran penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Pada negara maju UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan dengan

usaha besar. Pada negara berkembang, khususnya Asia, Afrika, dan Amerika Latin, UMKM juga berperan sangat penting khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Serta pembangunan ekonomi pedesaan (Tambunan & TH, 2002). Apabila dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Ekspor Non-Migas, khususnya produk-produk manufaktur, dan inovasi serta pengembangan teknologi, peran UMKM di NSB relative rendah, dan ini sebenarnya perbedaan yang paling mencolok dengan UMKM di negara maju.

#### **2.1.3.4 Masalah yang di hadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus bertambah setiap tahun. Di tahun 2018, jumlah pengusaha UMKM diprediksi mencapai 58,97 juta orang. Bahkan, angka ini diprediksi terus meningkat di tahun berikutnya seiring dengan kemajuan teknologi dan potensi sumber daya manusia yang semakin berkembang. Peningkatan jumlah UMKM ini membawa pengaruh yang cukup baik bagi perekonomian di Indonesia. Mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan produk domestik bruto yang cukup besar, yaitu mencapai 60,34 persen di tahun 2018. Tak heran, pemerintah menurunkan pajak UMKM menjadi 0,5 persen, agar geliat bisnis UMKM semakin berkembang pesat. Namun, ternyata masih banyak para pengusaha UMKM terkendala modal usaha, strategi pemasaran, hingga akses teknologi digital. Akibatnya, usaha mereka berjalan stagnan dan tidak mengalami kemajuan yang signifikan (Andrian Permana., 2020).

Dari sekian banyak permasalahan UMKM yang terjadi di Indonesia, beberapa permasalahan di bawah ini yang paling sering terjadi. Namun, jangan jadikan permasalahan ini sebagai penghalang, melainkan sebuah tantangan yang harus dilalui demi kelangsungan usaha. Adapun kendala yang di hadapi UMKM sebagai berikut :

##### **1. Minimnya Modal**

Permasalahan UKM paling utama adalah modal usaha yang terbatas. Akibatnya, para pengusaha tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omzet lebih banyak. Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus terhenti karena tidak adanya modal tambahan. Jika ditelusuri ke belakang, banyak pelaku

UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan. Hal tersebut senada dengan hasil survei yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers, yang mana 74 persen UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan.

2. Distribusi Tidak Tepat

Kurangnya channel untuk pendistribusian barang juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Rekomendasi teman dan pemasaran dari mulut ke mulut bahkan menjadi channel favorit pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Kenyataan di lapangan, pelaku UMKM yang didominasi oleh generasi X hanya berfokus pada kualitas produksi barang. Sehingga, terkadang distribusi menjadi kurang fokus dan ditempatkan pada nomor ke sekian. Padahal, salah satu permasalahan UMKM yang sering dihadapi oleh usaha kecil adalah distribusi dan pemasaran yang kurang tepat. Jika Anda tautentang teknik pemasaran yang tepat, peluang usaha UMKM Anda berkembang semakin besar.

3. Pengelolaan Keuangan Tidak Efisien

Kurangnya channel untuk pendistribusian barang juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Rekomendasi teman dan pemasaran dari mulut ke mulut bahkan menjadi channel favorit pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Kenyataan di lapangan, pelaku UMKM yang didominasi oleh generasi X hanya berfokus pada kualitas produksi barang. Sehingga, terkadang distribusi menjadi kurang fokus dan ditempatkan pada nomor ke sekian. Padahal, salah satu permasalahan UMKM yang sering dihadapi oleh usaha kecil adalah distribusi dan pemasaran yang kurang tepat. Jika Anda tautentang teknik pemasaran yang tepat, peluang usaha UMKM Anda berkembang semakin besar.

4. Kurangnya Inovasi

Banyak pelaku UMKM jalan di tempat dalam mengembangkan usahanya karena minimnya inovasi. Akhirnya banyak usaha yang hanya bertahan selama 1-2 tahun, kemudian bangkrut karena produk atau jasa yang ditawarkan tidak kuat atau kalah bersaing. Banyak pelaku UMKM di Indonesia yang hanya menjalankan bisnis berdasarkan ikut-ikutan tanpa melihat potensi diri yang dimilikinya. Tidak mengherankan jika produk UMKM lokal yang berhasil menembus pasar internasional terbilang masih sedikit. Pelaku UMKM diharapkan mampu untuk berpikir kritis sekaligus

inovatif dalam memproduksi barang dan jasa. Meski barang yang ditawarkan sejenis, tetapi jika masing-masing memiliki perbedaan yang signifikan membuat konsumen mempunyai banyak pilihan.

5. Belum Memaksimalkan Pemasaran Online

Salah satu faktor yang menyebabkan pendistribusian barang UMKM kurang meluas karena pengusaha belum melakukan pemasaran online. Mungkin, beberapa pelaku UMKM sudah memasarkan produknya secara online melalui media sosial, situs marketplace, dan lainnya. Akan tetapi, dalam prakteknya masih kurang maksimal. Sehingga, hasil yang didapat pun kurang maksimal. Kurangnya pengetahuan sampai dengan adaptasi terhadap internet dan perkembangan teknologi yang dialami pelaku UMKM ini menjadi tantangan dan masalah yang harus dihadapi.

6. Pembukuan Masih Manual

Pembukuan termasuk dalam pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan usaha. Kesulitan dalam memperhitungkan omset, laba kotor sampai dengan laba bersih karena pembukuan yang masih manual seringkali menghambat UMKM untuk bisa *growth* dan *scale up* bisnisnya. Walaupun terkesan tata tertib, pembukuan untuk bisnis merupakan hal yang sepele, nyatanya dengan data pembukuanlah suatu perusahaan bisa mengukur keberhasilan dan merencanakan strategi perusahaan ke depannya.

7. Manajemen Waktu

Manajemen waktu merupakan hal yang terlihat sepele, Namun pada dasarnya manajemen waktu merupakan permasalahan yang banyak dihadapi UMKM. Lebih dari 90 persen pemilik bisnis bekerja multi tasker, Mereka bekerjamenjadi pengusaha sekaligus pemilik bisnis kecil dan pengurus semua masalah bisnis kecil. Jika Anda tidak berusaha mengatur waktu sebaik mungkin, Anda akan mengalami kesulitan terkait dengan itu. Maka, buatlah daftar hal yang akan dilakukan "*To Do List*". Hal tersebut akan memudahkan para pemilik UMKM yang bekerja multitasker dalam mengatur waktu. Satu hal lagi, orang yang mengatur waktu dengan baik adalah orang yang membuat perbedaan.

8. Tidak Memiliki Izin

Permasalahan UMKM yang terakhir yaitu tidak adanya izin usaha

resmi, sehingga menghambat laju usaha para pelaku UMKM. Jika pelaku UMKM ingin mengembangkan usaha menjadi lebih besar lagi, maka seharusnya mengurus izin resmi untuk usaha. Kepemilikan badan hukum yang jelas hanyadimiliki oleh segelintir pelaku UMKM. Mayoritas UMKM juga mengalami tantangan di bidang pengetahuan mengenai aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan sampai dengan bagaimana proses yang ditempuh dalam proses pengurusannya.

Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM dinegara manapun juga, khususnya di dalam kelompok Negara sedang berkembang.

## **2.1.4 Perlakuan Akuntansi**

### **2.1.4.1 Aset dan Liabilitas**

Aset tersebut dikonfirmasi dalam laporan posisi keuangan, manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dapat dijamin mengalir ke dalam entitas, dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal. Jika manfaat ekonomi dianggap tidak mungkin mengalir ke entitas bahkan setelah pengeluaran terjadi, aset tersebut tidak akan diakui dalam laporan posisi keuangan. Alternatifnya, transaksi menghasilkan pengakuan beban dalam laba rugi.

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber dayamengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

#### **1. Pengakaun dan pengukuran aset dan liabilitas keuangan**

Entitas mengakui aset dan liabilitas keungan hanya ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual aset dan liabilitas keungantersebut, aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur sebesar biaya perolehannya, dan biaya perolehan aset da liabilitas keuangan diukur pada harga transaksi (transaction price). Contoh harga transaksi aset dan liabilitas keuangan adalah sebagai Berikut :

- a. Untuk pinjaman, harga transaksinya adalah sebesar jumlah pinjaman.
- b. Untuk piutang atau hutang, harga transaksiny adalah sebesar jumlah tagihan
- c. Untuk investasi pada instrumen ekuitas dan instrumen utang,

harga transaksinya adalah sebesar imbalan yang diberikan (contoh: kas yang dibayarkan untuk memperoleh investasi dalam bentuk saham perusahaan publik).

Biaya transaksi (transaction cost) adalah biaya yang terkait langsung dengan perolehan aset dan liabilitas keuangan. Biaya transaksi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Misalnya, entitas menerima pinjaman dari bank dan sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman tersebut, bank membebankan biaya tertentu. Entitas mencatat biaya transaksi atas pinjaman tersebut sebagai bebandalam laporan laba rugi.

Pada akhir periode pelaporan, entitas mengukur aset dan liabilitas keuangannya pada :

a. Harga transaksi

b. Dikurangkan dengan seluruh pembayaran pokok dan seluruh pembayaran atau penerimaan bunga sampai dengan tanggal tersebut.

Pada akhir periode pelaporan, entitas tidak mengakui penurunan nilai pada aset keuangan. Namun, entitas yang berada dalam pengawasan otoritas di bidang jasa keuangan dapat mengakui penyisihan atas pinjaman yang diberikan sesuai dengan ketentuan dari otorisasi tersebut.

## 2. Penghentian pengakuan

Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan hanya ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan akan diperoleh dari kepemilikan atau pelepasan aset keuangan. Entitas hanya menghentikan pengakuan liabilitas keuangannya (atau bagian dari liabilitas keuangan) ketika liabilitas keuangan tersebut berakhir (yaitu, kewajiban yang ditentukan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan, atau kedaluwarsa). Saat penghentian pengakuan aset, entitas akan mengakui laba rugi saat penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan dalam laporan laba rugi.

## 3. Penyajian

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dalam keadaan berikut, dan jumlah bersihnya tercantum dalam laporan keuangan: dan hanya jika entitas memiliki hak yang dapat diberlakukan secara hukum untuk mengimbangi jumlah yang

dikonfirmasi, dan bermaksud untuk melikuidasi aset dan liabilitas pada saat yang sama. Entitas mencantumkan aset keuangannya sebagai aset dalam laporan keuangan dan mencantumkan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan.

#### **2.1.4.2 Persediaan**

Persediaan adalah aset yang dijual dalam bentuk bahan atau peralatan yang digunakan dalam aktivitas normal, dalam proses produksi penjualan, dan dalam proses produksi atau saat memberikan jasa.

##### **1. Pengakuan dan pengukuran persediaan**

Entitas mengakui persediaan pada harga perolehan saat memperolehnya. Biaya inventaris mencakup semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul untuk membawa inventaris ke keadaan dan lokasi siap pakai. Jika hasilnya mendekati biaya, untuk kenyamanan, Anda dapat menggunakan teknik pengukuran biaya persediaan, seperti metode biaya standar atau metodeceran. Entitas dapat memilih untuk menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang untuk menentukan biaya persediaan.

##### **2. Penyajian persediaan**

Persediaan dicatat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan. Pada saat persediaan dijual, nilai bukunya diakui sebagai beban selama periode pendapatan relevan diakui.

#### **2.1.4.3 Aset Tetap**

Aset tetap mengacu pada aset yang dimiliki oleh entitas yang digunakan dalam proses bisnis normal dan diharapkan dapat digunakan oleh entitas selama lebih dari satu periode.

##### **1. Pengakuan dan pengukuran**

Entitas menerapkankriteria pengakuan dalam menentukan pengakuan aset tetap. Oleh karena itu, entitas mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya perolehan aset tetap, jika :

- a. Manfaat ekonomi dapat dipastikan mengalir ke dalam atau dari entitas.
- b. Biaya dapat diukur dengan andal.

Sekalipun tanah dan bangunan dibebaskan pada saat yang sama, tanah dan bangunan merupakan aset yang dapat dicatat secara terpisah. Jika aset tetap dimiliki secara hukum oleh entitas pada



harga perolehan, catat aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap termasuk harga pembelian dan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi di mana aset tersebut siap untuk digunakan seperti yang diharapkan.

## 2. Pengukuran setelah pengakuan awal

Entitas mengukur seluruh aset tetap, kecuali tanah, setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Biaya perbaikan dan renovasi aset tetap dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset tetap maupun atas tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau untuk keduanya.

### 2.1.4.4 Penyusutan

Beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi. Penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun, namun nilai sisa (nilai sisa) tetap harus diperhatikan. Ketika aset tersebut tersedia untuk digunakan, aset tetap tersebut mulai disusutkan, sebagai contoh, aset tersebut terletak di lokasi yang diinginkan oleh manajemen dan dalam kondisi operasi yang diperlukan. Ketika aset tidak digunakan atau penggunaan aset dihentikan, depresiasi akan berhenti kecuali aset tersebut telah disusutkan sepenuhnya. Masa manfaat aset ditentukan berdasarkan taksiran masa manfaat entitas.

#### 1. Penghentian pengakuan

Entitas menghentikan pengakuan aset tetap pada saat aset tetap dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tetap tersebut. Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap dalam laporan laba rugi ketika aset tetap tersebut:

- a. Dijual sehingga selisih antara jumlah rupiah yang diterima dan nilai buku aset tetap dicatat sebagai pendapatan lain-lain (jika untung) atau beban lain-lain (jika rugi).
- b. Diserahkan kepada pihak lain, sehingga dicatat sebagai beban lain-lain sebesar nilai buku aset tersebut
- c. Dimusnakan, sehingga dicatat sebagai beban lain-lain sebesar nilai buku aset tetap tersebut.

## 2. Penyajian

Aset tetap disajikan dalam kelompok laporan posisi keuangan.

### 2.1.4.5 Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Ekuitas adalah klaim atas hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas, yang tidak memenuhi definisi liabilitas.

#### 1. Pengakuan dan pengukuran

Ekuitas yang disetor oleh owner dana bisa berbentuk kas ataupun setara kas ataupun peninggalan non kas yang dicatat cocok dengan peraturan perundangan yang berlaku. Buat entitas yang berupa Perseroan Terbatas, akun bonus modal disetor disajikan buat tiap kelebihan setoran modal atas nilai nominal saham. Buattubuh usaha yang tidak berbadan hukum Perseroan Terbatas, ekuitas diakui serta diukur cocok dengan peraturan perundangan yang berlaku buat tubuh usaha tersebut

#### 2. Penyajian

Modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi disajikan dalamkelompok ekuitas di laporan posisi keuangan.

### 2.1.4.6 Pendapatan

Entitas mengakui pendapatan kontrak serta bayaran kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi masing-masing selaku pendapatan serta beban sebesar jumlah tagihan. Dalam perihal entitas sudah menerima duit muka saat sebelum kegiatan kontrak diawali, hingga entitas bisa mengakui pendaptan bunga serta dividen kala pemasukan tersebut diterima sepanjang periode.

Pendapatan diakui kala ada hak atas pembayaran yang diterima ataupun yang masih wajib diterima baik pada masa saat ini ataupun masa depan. Entitas mencatat pemasukan buat khasiat ekonomi yang diterima ataupun masih wajib diterima secara bruto. Dalam ikatan keagenan, entitas mencatat pemasukan cuma sebesar jumlah komisi. Entitas dapat mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang atau penyediaan jasa jika :

- a. Jika pembeli membayar sebelum barang atau jasa tersebut diberikan, maka entitas mengakui penerimaan tersebut sebagai liabilitas, yaitu pendapatan jasa diterima di muka
- b. Jika pembeli belum membayar ketika barang atau jasa tersebut telah

diberikan, maka entitas mengakui adanya aset, yaitu piutang usaha.

Entitas dapat mengakui pendapatan lain seperti pendapatan hibah. Pendapatan hibah adalah bantuan yang diterima oleh entitas dalam bentuk pengalihan sumber daya. Hibah termasuk bantuan dari pemerintah maupun pihak lain yang diberikan kepada entitas bukan dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

Entitas mengakui penerimaan hibah dalam laba rugi pada saat hibah tersebut diterima sebesar jumlah nominalnya. Hibah termasuk hibah aset non moneter seperti tanah atau sumber daya lain, tidak diakui hingga terdapat keyakinan yang memadai bahwa :

- a. Entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut.
- b. Hibah akan diterima

Entitas dapat mengakui pendapatan lain seperti keuntungan dari penjualan aset ketika kepemilikan atas aset tersebut telah beralih kepada pemilik baru. Keuntungan tersebut merupakan hasil penjualan dikurangi jumlah tercatat aset sebelum aset tersebut dijual.

#### **2.1.4.7 Beban dan pajak penghasilan**

##### **1. Pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan**

Entitas mengakui aset dan liabilitas pajak penghasilan dengan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Entitas tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan.

##### **2. Penyajian beban**

Pendapatan disajikan dalam kelompok pendapatan dalam laporan laba rugi. Entitas menyajikan pendapatan hibah sebagai bagian dari laba rugi, baik secara terpisah atau dalam akun umum seperti “pendapatan lain-lain”, atau alternatif lain, sebagai pengurang beban terkait. Beban disajikan dalam kelompok beban dalam laporan laba rugi.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil dari penelitian terdahulu :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

NO.	NAMA PENELITI DAN JUDUL JURNAL	HASIL PENELITIAN
1.	<p>Judul Penelitian : Analisis Penerapan SAK-EMKM Pada Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Di Kota Batam</p> <p>Nama Peneliti : Mortigor Afrizal Purga</p> <p>Judul Jurnal : Jurnal Akuntansi Barelang Vol.3 No.2 Tahun 2019</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Keterbatasan waktu dalam mengelolakeuangan, pemilik usaha juga harus mengendalikan kinerja karyawan dan pengembangan bisnisnya dari waktu ke waktu. (2) Manajemen usaha belum tahu tentang keberadaan SAK-EMKM yang mengatur standar laporan keuangan untuk jenis usaha yang mereka kelola atau bisnis yang mereka jalankan. (3) Sumber daya manusia yang terbatas dari usaha yang sedang berjalan, karena pada umumnya manajemen keuangan masih ditangani dengan sendirinya oleh pemilik usaha.</p>
2.	<p>Judul Penelitian : Implementasi SAK-EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM</p> <p>Nama Peneliti : Ari Nuvitasari, Norita Citra, Nina Martania</p> <p>Judul Jurnal : International Journal of Social Sciene and Business. Volume 3, Number 3,</p>	<p>Dalam mengembangkan bisnisnya, pemilik UMKM mengalami banyak kendala dan permasalahan yang terjadi. Penyusunan laporan keuangan UD. Penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan dimaksudkan agar pemilik UMKM mengetahui bagaimana langkah – langkah untuk menyajikan dan menyusun laporan keuangan seperti standar yang berlaku. Langkah yang harus dilakukan dalam mencatat laporan</p>

Tahun 2019, pp.341-347. P-ISSN : 2614-6533

E-ISSN :2449 - 6409

3. Judul Penelitian : Penerapan SAK EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Pesisir Di Kecamatan Malalayang Manado )

Nama Peneliti : Yuli Rawun ,  
Owslad N.Tumilaar

Judul Jurnal : Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis Vol.12, No. 1, Mei 2019, 57-66

keuangan yaitu pengakuan dan pengukuran, kemudian melakukan pencatatan transaksi dan mengelompokkan akun-akun laporan keuangan, dan langkah selanjutnya adalah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan buku-buku pencatatan transaksi. Dalam SAK EMKM tidak ada laporan keuangan arus kas, karena di dalam SAK EMKM hanya terdapat 3 laporan keuangan adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti, telah didapat empat model yaitu Pertama, bahwa sebagian besar dari UMKM di Pesisir Pantai Malalayang ini belum menyusun laporan keuangan secara rutin. Kedua, ada UMKM tidak melakukan pencatatan sama sekali, hanya menghitung total uang yang masuk pada hari itu juga berapa dan disisihkan uang untuk pembelanjaan esok harinya sebesar berapa. Ketiga, ada UMKM yang hanya melakukan pencatatan hasil uang yang masuk dan menyisihkan uang untuk belanja di esok harinya. Pencatatan yang mereka buat hanya untuk total pendapatan mereka di satu hari itu. Keempat, ada UMKM yang mencatat hasil total penjualan lewat nota, namun mereka hanya mencatat total penjualan tidak membuat laporan keuangan yang baku.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti, didapat kesimpulan sebagai berikut:

UMKM yang terdaftar di Kantor Kelurahan Malalayang II Kecamatan Malalayang sebanyak 74 UMKM. Tidak ada UMKM satupun yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Tidak adanya keinginan setiap pelaku UMKM untuk berusaha membuat laporan keuangan dikarenakan waktu dan pengetahuan yang lebih untuk menyusun laporan keuangan.

4. Judul Penelitian : Pengetahuan dan Pemahaman pelaku UMKM atas SAK EMKM

Nama Peneliti :  
Qimyatussa'adah, Sasmito W.  
Nugroho, Halleina R. P.  
Hartono

Judul Jurnal : Jurnal MONEX  
Volume 9 Nomor 2 Bulan Juli  
Tahun 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman para pelaku UMKM di Kota Madiun tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Penelitian ini menggunakan metode survey dengan sejumlah pertanyaan sederhana tentang SAK EMKM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 90% dari 112 responden belum memahami dan mengimplementasikan SAK EMKM pada laporan keuangannya. Oleh karenanya, sosialisasi dan pelatihan yang berkesinambungan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa informasiseputar penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dapat diketahui oleh para pelaku

5. Judul Penelitian : Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis SAK EMKM Pada PT. MAMA JAYA

Nama Peneliti : Ketut Ari Warsadi, Nyoman Tresna Herawati, Putu Julianto

Judul Jurnal : e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume : 8 No: 2 Tahun 2017 )

UMKM secara menyeluruh.

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk menganalisis kinerja keuangan yang dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar membuat keputusan-keputusan ekonomi. Penelitian ini ditujukan kepada UKM yang belum memiliki laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem akuntansi sederhana yang dapat membantu dan memudahkan parapemilik UKM dalam membuat laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas keuangan serta menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan obyek penelitian sebuah UKM yang belum menerapkan penyusunan laporan keuangan berbasis SAKEMKM. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa UKM menyusun laporan keuangan masih sangat sederhana dan manual dikarenakan UKM hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran guna mendapatkan informasi laba saja. Hasil penyusunan laporan keuangan

6. Judul Penelitian : Penerapan SAK-EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Di UD DuaPutri Sholehah Probolingo)

Nama Peneliti : Tatik Amani

Judul Jurnal : E-ISSN : 2598-6074, P-ISSN : 2598 - 2885

berdasarkan SAK EMKM berupa neracadengan total aktiva dan pasivanya sebesar Rp.2.190.100.446, laporan laba rugisebesar Rp. 81.537.814,dan catatan atas laporan keuangan.

Pembangunan ekonomi yang terus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu usahanya adalah dengan pembinaan dan menumbuhkembangkan baik usaha mikro, usaha kecil maupun menengah atau UMKM. Penelitian ini bertujuan menerapkan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM UD Dua Putri Solehah Probolingo. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan perhitungan matematis memakai rumusan sesuai SAK EMKM. Hasil penelitian pada UMKM UD Dua Putri Solehah menunjukkan bahwa Laporan Keuangan belum disusun seperti standard yang ditetapkan SAK EMKM. Sesuai aturan setiap entitas UMKM diwajibkan menyajikan sebuah Laporan Keuangan seperti standar dan kaidah SAK EMKM yang berlaku mulai 1 Januari 2018. Laporan ini sebagai dasar untuk mengambil keputusan bagi yang berkepentingan dan merupakan syarat pengajuan dana untuk memperbesar modal usaha ke perbankan. Sesuai hasil penelitian



- dan pembahasan maka penulis menerapkan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan untuk menyajikan Laporan Keuangan pada UMKM UD Dua Putri Solehah Probolinggo sesuai standar dan kaidah SAK EMKM yang berlaku. Laporan Keuangan yang peneliti susun yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laba Rugi dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
7. Judul Penelitian : Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus Di UMKM Fresh Fish Bantul)
- Nama Peneliti : Muhammad Susanto, Rintan Nuzul Ainy
- Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan uraian-uraian yang telah dikemukakan mengenai pembahasannya analisis laporan keuangan UMKM Fresh Fish, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penyusunan laporan keuangan pada UMKM Fresh Fish berdasarkan SAK EMKM belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM dikarenakan satu komponen laporan tidak dibuat yakni catatan atas laporan keuangan yang dimana komponen ini menjadi sangat penting untuk dibuat pada laporan keuangan UMKM untuk memenuhi standar. Oleh karena itu, penulis melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM agar UMKM dapat menyusun setelahnya. Kendala yang dialami oleh UMKM Fresh Fish dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yaitu:

- 1) Lingkup usaha yang kecil sehingga membuat laporan keuangan yang telah dibuat sudah mencukupi kebutuhan pemilik.
- 2) Tidak adanya regulasi yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM mengakibatkan rendahnya penyusunan laporan keuangan.
- 3) Tidak adanya hubungan UMKM dengan pihak luar atau perbankan yang membuat pelaku usaha tidak berkeinginan untuk membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.
- 4) Pandangan dari pemilik yang dirasa pencatatan tidak mengharuskan sesuai standar namun pencatatan yang dapat memenuhi kebutuhan pemilik UMKM.

8. Judul Penelitian :  
Implementasi SAK EMKM  
Pada Laporan Keuangan  
UMKM (Studi Kasus Pada  
UMKM XYZ Yogyakarta)

Nama Peneliti : Tatik

Judul Jurnal : Jurnal Relasi ,  
Vol.XIV, No. 02, Juli 2018

Penelitian ini menghasilkan laporan keuangan UMKM XYZ sesuai dengan standar SAK EMKM yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Adapun rincian laporan keuangan UMKM XYZ sebagai berikut:  
Laporan Posisi Keuangan UMKM XYZ Laporan posisi keuangan menyajikan asset, liabilitas dan ekuitas suatu entitas pada akhir periode tertentu. Laporan posisi keuangan yang peneliti susun berdasarkan informasi dari UMKM.

Laporan Laba Rugi Laporan laba rugi menyajikan informasi tentang pendapatan, beban keuangan, beban pajak, dan laba atau rugi neto dari perusahaan (SAK EMKM, 2016).

Catatan Atas  
Laporan

Keuangan Adapun Catatan atas Laporan Keuangan UMKM XYZ yang peneliti susun sebagai berikut:

1. UMUM Entitas didirikan di Yogyakarta dan belum dikukuhkan menjadi badan hukum. Entitas bergerak dalam bidang perdagangan. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil dan menengah sesuai Undang-Undang 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Yogyakarta.

## 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

### a. Pernyataan

Kepatuhan Laporan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

b. Dasar Penyusunan Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah rupiah.

c. Aset Tetap Asset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya dan disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa

nilai residu.

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan penjualan diakui saat terjadi pengiriman barang kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadinya

### 3. DEPOSITO

Deposito di BMT sebesar Rp 100.000.000,00 dengan nisbah bagi hasil.

### 4. UANG MUKA PEMBELIAN

Uang Muka Pembelian senilai Rp

98.640.000 merupakan uang muka yang dibayarkan kepada supplier atas pesanan pembelian barang dagangan.

### 5. SALDO LABA

Saldo laba merupakan selisih pendapatan dan beban pada bulan Februari 2018.

9. Judul Penelitian : Kesiapan UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi UMKM Di Kabupaten Bora)

Nama Peneliti : Ahmad Sholikin, Ade Setiawan

Judul Jurnal : JIFA (Journal of Islamic finance and accounting)  
Vol. 1 No. 2, Juni-  
November 2018 P-ISSN :

Pertama, berdasarkan hasil temuan wawancara dengan Ibu Een Martini dan dokumen pencatatan transaksi harian dari Rumah Mode Een Productions . Karena tidak melakukan penyusunan laporan keuangan maka peneliti menggunakan pencatatan transaksi harian Ru-mah Mode Een Productions. Menunjukkan bahwa Usaha Rumah Mode Een Productions tidak siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM, hal tersebut dikarenakan :

2615-1774 E-ISSN : 2615-1782

1. Rumah Mode Een Productions tidak mengetahui tentang SAK EMKM. Karena belum mendapatkan sosialisasi dari Dindagkop UKM Kabupaten Blora.
2. Dalam pencatatan keuangan masih menggunakan basis kas. Karena Rumah Mode Een Productions mencatat transaksi ketika mengeluarkan dan menerima kas.
3. Rumah Mode Een productions sudah menerapkan konsep entitas bisnis. Walaupun sudah memisahkan keuangan pribadi dan usaha, tetapi dalam penentuan keuntungannya masih belum jelas. Rumah Mode Een Productions belum membuat laporan keuangan. Dikarenakan tidak adanya SDM yang paham tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Kedua, berdasarkan temuan hasil wawancara dengan Ibu Yuniati dan dokumen pen-catatan transaksi Kanaya Konveksi menunjukkan bahwa Kanaya Konveksi tidak siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Dikarenakan : Kanaya Konveksi tidak mengetahui tentang adanya standard akuntansi keuangan yang baru yaitu SAK EMKM. Dalam pencatatan keuangan masih menggunakan basis kas. Walaupun sudah memisahkan keuangan

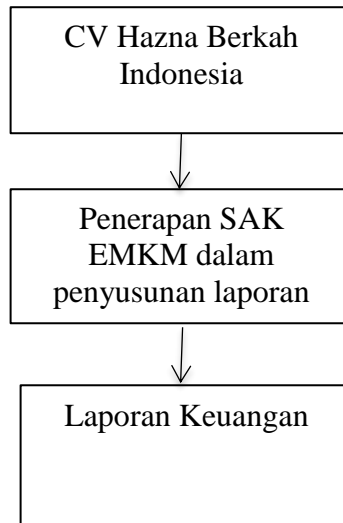
- pribadi dan keuangan usaha, serta paham tentang pentingnya laporan keuangan tetapi, Kanaya Konveksi belum memiliki SDM yang memahami tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standard akuntansi keuangan. Penelitian ini mendapatkan temuan di luar konteks yang diteliti yaitu bahwa jenjang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesiapan implementasi SAK EMKM. Walaupun jenjang pendidikan tinggi tetapi tanpa ada sosialisasi, pelatihan dan pendampingan maka SDM tidak akan memahami tentang penyusunan laporan keuangan. Seperti halnya Ibu Eni Martini dengan pendidikan S1 dan Ibu Yuniati dengan pendidikan SMP tetapi mereka memiliki pemahaman yang sama dalam pembukuan usaha.
10. Judul Penelitian : Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap SAK EMKM : Survey Pada UMKM Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru
- Nama Peneliti : Neneng Salmiah, Satria Tri Nanda, Intan Adino
- Judul Jurnal : Jurnal.USTJOGJA.AC.ID Akuntansi Dewantara Vol. 2 No.2 Oktober 2018
- Hasil Penelitian Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tanggapan responden terhadap variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah SAK EMKM. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata yang diperoleh dari skor jawaban responden. Dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa pemahaman Pelaku UMKM terhadap SAK EMKM: Survey pada UMKM di Kota Pekanbaru masih pada tingkat cukup. Pemahaman pada tingkat cukup ini, terutama pemahaman

tentang konsep asumsi dasar yaitu konsep akrual basis dan konsep entitas bisnis serta konsep penyajian laporan keuangan yaitu informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk konsep pengukuran biaya historis, asumsi kelangsungan usaha dan komponen laporan keuangan, Pelaku UMKM memiliki pemahaman yang tinggi.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

SAK-EMKM dirancang untuk mewakili standar laporan keuangan entitas tanpa tanggung jawab publik. Entitas yang laporan keuangannya memenuhi SAK-EMKM harus membuat pernyataan kepatuhan yang jelas dan lengkap dalam catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, pada artikel kali ini peneliti akan menganalisis laporan keuangan pemilik UMKM, terlepas dari apakah laporanyang disampaikan sesuai dengan SAK-EMKM. Struktur yang merupakan neraca dan laporan laba rugi juga melibatkan integritas laporan keuangan yang bersumber dari SAK-EMKM. Laporan keuangan SAK-EMKM meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perputaran ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

**Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual**



Keterangan : Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan syarat dalam SAK EMKM tersebut.